

BAB III

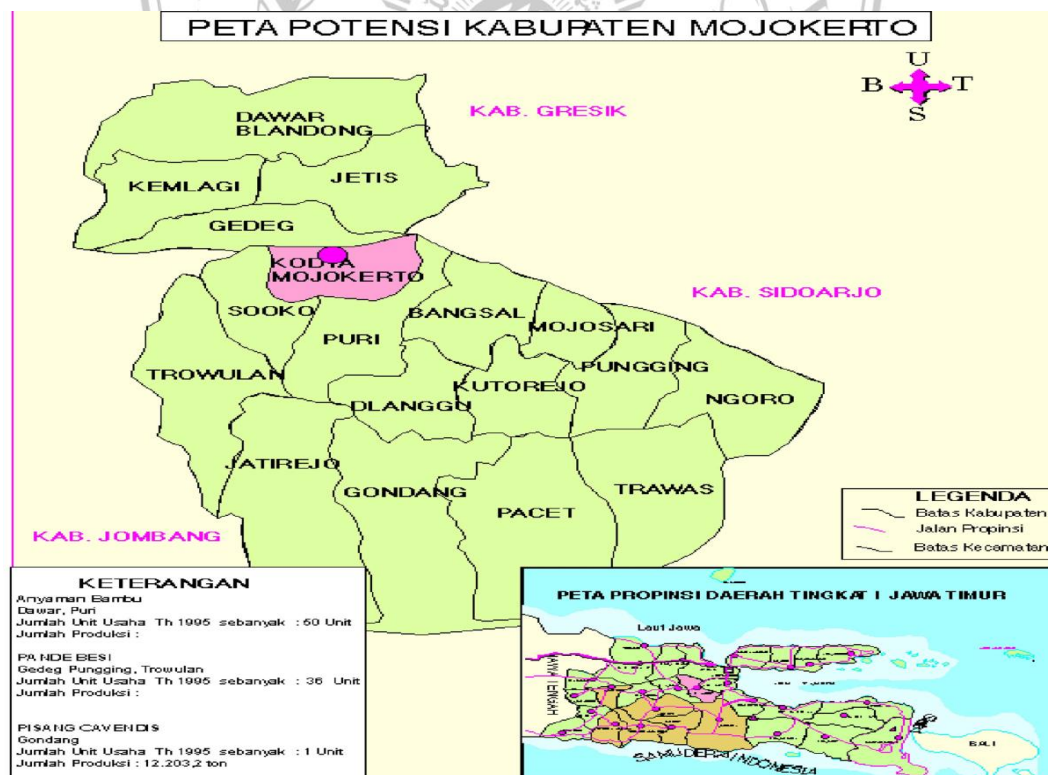
DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

3.1.1 Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Mojokerto mempunyai luas 692,15 km² yang terletak antara 111° 20'13" sampai dengan 111° 40'47" bujur timur dan antara 7° 18'35" sampai dengan 7°47'30" lintang selatan. Secara geografis sebelah utara Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Sebelah Selatan Kabupaten Malang dan Kota Batu, Sebelah Tirnur Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan, sebelah Barat Kabupaten Jombang.¹

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Mojokerto



¹ Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021

Di samping itu, Kabupaten Mojokerto memiliki wilayah kota yang terletak di tengah dan dikelilingi Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3. 1
Cakupan Luas Area Tiap Kebutuhan Daerah²

Area Penggunaan	Luas (Km2)
Permukiman	132.440
Pertanian	371.010
Hutan	289.480
Rawa / Waduk	0.490
Perkebunan	170.000
Lahan Kritis	0.200
Padang Rumput	1.590
Semak / Alang-Alang	0.720

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa area penggunaan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto adalah area pertanian dengan total luas 371.010 Km². Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto walaupun memiliki are yang luas dibidang pertanian namun mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang Industri.

Sedangkan wilayah Kabupaten Mojokerto memiliki 18 kecamatan, 304 desa yang dapat dutabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Jumlah Kecamatan di Kabupaten Mojokerto³

No	Kecamatan	Ketinggi dari Permukaan Laut	Luas (Km2)
1	Jatirejo	140	32,98
2	Gondang	240	39,11
3	Pacet	570	45,16
4	Trawas	800	29,87
5	Ngoro	25	57,48
6	Pungging	30	48,14
7	Kutorejo	500	42,83
8	Mojosari	36	26,65
9	Bangsar	30	24,06
10	Mojoanyar	23	23,02
11	Dlanggu	17	35,42
12	Puri	70	35,65

² Dokumen BPS Kabupaten Mojokerto, 2015

³ Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto, Tahun 2015

13	Trowulan	40	39,20
14	Sooko	64	23,46
15	Gedek	26	22,98
16	Kemlagi	22	50,05
17	Jetis	35	57,17
18	Dawarblandong	75	58,93

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa daerah kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah kecamatan Dawarblandong, yaitu 58,93 Km², sedangkan kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas paling sedikit adalah kecamatan Gedek, yaitu 22,98 Km².

3.1.2 Topografi

Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah 872 km², dimana bagian selatan kabupaten adalah wilayah pegunungan yang banyak terdapat berbagai tanaman. Sedangkan Kabupaten Mojokerto bagian tengah adalah berupa dataran, begitu juga dengan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan. Kabupaten Mojokerto memiliki jenis tana yang sangat subur untuk usaha pertanian, karena memiliki jenis tana alluvial dan grumosol, dimana jenis tana tersebut merupakan endapan tanah liat bercampur dengan pasir halus, berwarna hitam kelabu dengan daya penahan air yang cukup baik.

Meskipun kabupaten Mojokerto memiliki tana yang luas untuk pertanian, namun masyarakatnya lebih tertarik untuk bekerja dalam bidang produksi karena banyaknya industri yang ada di Kabupaten Mojokerto, dimana mayoritas bekerja di bidang Industri dengan jumlah 149.714 jiwa. Kemudian disusul dengan bidang perdagangan, baik wirausaha maupun wiraswasta dengan total jumlah 118.884 jiwa.

3.1.3 Penduduk

Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah penduduk yang paling banyak adalah perempuan dibanding penduduk laki-laki dengan Sex Ratio penduduk Kabupaten Mojokerto adalah 98,59. Jumlah total penduduk Kabupaten Mojokerto adalah 1.186.497 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,05%, dimana penduduk Kecamatan Sooko merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan sebesar 3.444 jiwa per km².⁴

3.1.4 Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Mojokerto mayoritas bekerja di bidang Industri dengan jumlah 149.714 jiwa, kemudian yang bekerja di bidang perdagangan, rumah makan/restoran/ warung/catering dan jasa akomodasi (hotel dan penginapan lainnya) berjumlah 118.884 jiwa. Selain itu masyarakat yang memiliki pencaharian pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang mencapai jumlah 107.862 jiwa.

Pada tahun 2014, dimana jumlah pencari kerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Selama 2014 keseluruhan permintaan/lowongan kerja sebanyak 4.256, yang dapat dipenuhi sebanyak 3.618 atau sebesar 85,01%. Sedangkan untuk pemegang ijin bekerja bagi Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Kabupaten Mojokerto sebanyak 331 orang, dimana terbanyak berasal dari negara China RRC dan kebanyakan mereka bekerja pada sektor industri pengolahan.

⁴ Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016 - 2021

3.1.5 Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan merupakan determinan yang sangat urgen dalam penentuan tingkat kualitas hidup manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya yang dimilikinya. Pemerataan kesempatan memperoleh akses pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta peningkatan peranan kelembagaan dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan selama Tahun 2011-2014, cenderung mengalami peningkatan.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Mojokerto cenderung meningkat, hal ini menandakan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan secara formal masih cukup tinggi meskipun melalui program pendidikan Kelompok Belajar (Kejar) paket pada tingkat Paket A, B maupun C.

3.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Seringkali angka pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka dimaknai semakin berhasil pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan sebuah prestasi. Tapi pada hakikatnya tidak demikian, pembangunan ekonomi yang berkualitas yang harus menjadi tujuan utama.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Sehingga angka pertumbuhan disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi dari seluruh sektor ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto terus membaik selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto hanya 5,21 persen. Kondisi makro ekonomi terus menguat sehingga di penghujung tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,78 persen. Perekonomian semakin kondusif dan terus berlanjut hingga tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2011 mencapai 7,03 persen, melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional. Selama tahun 2012 perekonomian Kabupaten Mojokerto cukup stabil sehingga mampu tumbuh sebesar 7,21 persen. Hal ini dapat terjadi akibat kebijakan di bidang investasi, pengembangan infrastruktur, serta regulasi di bidang ekonomi lainnya.⁵

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto kembali melambat mencapai 6,92 persen. Penurunan output beberapa sektor ekonomi akibat dari gejolak ekonomi global dan faktor internal disinyalir sebagai penyebab melambatnya pertumbuhan tersebut. Namun Kabupaten Mojokerto termasuk satu dari sekian banyak wilayah di Jawa Timur yang pertumbuhannya di atas angka pertumbuhan Jawa Timur, sebuah capaian yang menggembirakan, tetapi masih harus tetap melakukan pembenahan di beberapa aspek masa mendatang.

Secara umum, gambaran komprehensif mengenai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia pada suatu wilayah dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun dapat memberikan sinyal peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan khususnya kualitas sumber daya manusia setiap tahunnya. Angka IPM tahun 2010 sebesar 73,39, tahun 2011 sebesar 73,89, tahun 2012 sebesar

⁵ Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016 - 2021

74,42, dan tahun 2013 sebesar 75,26. Angka ini di atas rata-rata variasi nilai IPM antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Angka IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 73,54. Sedangkan reduksi shortfall Kabupaten Mojokerto cukup besar mencapai 3,27.⁶

Angka-angka IPM tersebut menunjukkan adanya pencapaian yang baik dari pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap perkembangan IPM yang mana selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari Tahun 2010 – 2013. Peningkatan nilai IPM yang signifikan ini juga tentu dihasilkan dari kinerja pemerintah Kabupaten Mojokerto pada periode sebelumnya.

3.2 Pendapatan Asli Daerah

Sepanjang tahun 2011-2015 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2015⁷

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Hasil Pajak Daerah	58.395.460.728,25	74.972.432.195,10	120.684.456.138,60	185.724.705.656,89	40.250.684.628,01
Hasil Retribusi Daerah	37.452.623.578,63	32.345.591.330,85	40.453.510.897,20	43.173.235.089,92	9.091.188.199,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.053.961.447,14	3.950.657.474,18	3.950.299.419,74	3.916.336.410,61	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.053.961.447,14	53.505.065.878,85	53.924.968.283,47	123.935.121.342,49	26.569.711.865,00
Total	108.709.405.732,32	164.773.746.878,98	219.013.234.739,01	356.749.398.499,91	75.911.584.692,05

⁶ Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016 - 2021

⁷ Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2011, jumlah PAD mencapai 108.709.405.732,32 dengan kontribusi terbesar dari hasil pajak daerah dengan jumlah mencapai 53.395.460.728,25. Pada Tahun 2012, jumlah PAD mencapai 164.773.746.878,98 dengan kontribusi terbesar berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 53.505.065.878,85. Pada Tahun 2013, jumlah PAD mencapai 219.013.234.739,01 dengan kontribusi terbesar berasal dari hasil pajak daerah dengan jumlah mencapai 120.684.456.138,60.

Pada Tahun 2014, jumlah PAD Kabupaten Mojokerto mencapai 356.749.398.499,91 dengan kontribusi terbesar berasal dari hasil pajak daerah dengan jumlah 185.724.705.656,89. Pada Tahun 2015, data yang tersedia hanyasampai pada Triwulan I dengan jumlah PAD Kabupaten Mojokerto mencapai 75.911.584.692,05 dengan kontribusi terbesar dari hasil pajak daerah sebesar 40.250.684.628,01.

3.3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

3.3.1 Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

1. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.

2. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.2 Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah

1. Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Sekretariat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, membawahi Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, membawahi 3 Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - 2) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 3) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.
4. Bidang Penagihan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, membawahi 3 Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :
 - 1) Sub Bidang Penagihan I;
 - 2) Sub Bidang Penagihan II;
 - 3) Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan.
5. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui

Sekretaris, membawahi 3 Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :

- 1) Sub Bidang Pengembangan;
- 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
- 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;

- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;

- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah meliputi pelayanan dan penetapan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan atas permohonan wajib pajak;
- b. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan informasi kepada wajib pajak;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan subjek/objek pajak;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan verifikasi subyek/obyek pajak daerah;
- e. perumusan pengelolaan data induk wajib pajak;
- f. pelaksanaan penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan dokumen lainnya;
- g. perumusan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP dari wajib pajak;

- h. perumusan dan penyampaian blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
 - i. pelaksanaan pendaftaran dan penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP);
 - j. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerbitan dan penyampaian Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - k. pelaksanaan verifikasi dan validasi SPTPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
5. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan
- a. melakukan pelayanan atas permohonan wajib pajak;
 - b. melakukan pelayanan konsultasi dan informasi kepada wajib pajak;
 - c. melakukan penerbitan dan menyampaikan kartu NPWPD;
 - d. melakukan pengolahan data dan verifikasi subyek/obyek pajak daerah;
 - e. melakukan penetapan dan menerbitkan SKPD/ SPPT/DHKP dan dokumen lainnya;
 - f. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
6. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- a. menyusun dan menyampaikan blangko SPOP/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) kepada wajib pajak;

- b. melakukan penerimaan SPOP/LSPOP dari wajib pajak;
 - c. melakukan pendaftaran dan menetapkan Nomor Obyek Pajak (NOP);
 - d. melakukan pendataan lapangan/lokasi obyek pajak;
 - e. melakukan penilaian obyek pajak;
 - f. melakukan verifikasi data SPOP/LSPOP PBB perdesaan dan perkotaan;
 - g. melakukan verifikasi dan validasi SPTPD BPHTB;
 - h. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
 - i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
7. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
- a. menyusun dan menyampaikan blangko SPTPD kepada wajib pajak;
 - b. melakukan pendaftaran dan menetapkan NPWPD;
 - c. melakukan pendataan obyek pajak;
 - d. melakukan verifikasi pelaporan SPTPD dari wajib pajak;
 - e. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

8. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah meliputi

penagihan serta penerimaan dan keberatan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyampaian SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya;
- b. pelaksanaan proses atas permohonan angsuran pembayaran pajak daerah;
- c. pelaksanaan proses atas permohonan pengurangan keberatan dan banding ketetapan pajak daerah;
- d. pelaksanaan proses penagihan pajak daerah
- e. pelaksanaan proses penagihan dengan surat paksa;
- f. pelaksanaan sosialisasi perpajakan daerah;
- g. pelaksanaan penertiban pajak daerah;
- h. pelaksanaan pengelolaan data piutang pajak daerah;
- i. pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pembukuan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

9. Sub Bidang Penagihan I

- a. melakukan penyampaian SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
- b. melakukan proses penagihan pajak daerah di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan

Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;

- c. melakukan proses penagihan dengan surat paksa di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
- d. melakukan sosialisasi perpajakan daerah di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
- e. melakukan penagihan piutang pajak daerah di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
- f. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
- g. melakukan proses penertiban pajak daerah di wilayah Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Pungging, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Mojoanyar;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan.

10. Sub Bidang Penagihan II

- a. melakukan penyampaian SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
- b. melakukan proses penagihan pajak daerah di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
- c. melakukan proses penagihan dengan surat paksa di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
- d. melakukan sosialisasi perpajakan daerah di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
- e. melakukan penagihan piutang pajak daerah di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan

Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;

- f. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
 - g. melakukan proses penertiban pajak daerah di Kecamatan Sooko, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;
 - h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan.
11. Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan
- a. memproses permohonan angsuran pembayaran pajak daerah;
 - b. memproses permohonan pengurangan, keberatan dan banding ketetapan pajak daerah;
 - c. melakukan pengelolaan data piutang pajak daerah;
 - d. melakukan penerimaan dan pembukuan;
 - e. menyusun bahan penyusunan produk hukum;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan.

12. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi

Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan

Pendapatan Daerah meliputi pengembangan, pemeriksaan dan penyidikan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. perumusan produk hukum perpajakan daerah;
- c. perumusan perencanaan target PAD;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan PAD;
- e. pelaksanaan koordinasi peningkatan potensi PAD;
- f. pelaksanaan evaluasi pemungutan PAD;
- g. pelaksanaan pemeriksaan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan penelitian bahan dan keterangan lingkup penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan daerah;
- i. pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana perpajakan;
- j. pelaksanaan pelaporan atas pemungutan PAD; k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

13. Sub Bidang Pengembangan

- a. melakukan pengumpulan data potensi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
- b. menyusun perencanaan target PAD;
- c. melakukan pemberian rekomendasi dalam penyusunan petunjuk teknis pemungutan retribusi daerah;

- d. menyusun bahan penyusunan produk hukum perpajakan daerah;
- e. menyusun data potensi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
- f. melakukan pembinaan teknis atas pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

14. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

- a. melakukan monitoring dan evaluasi pemungutan PAD;
- b. melakukan pengawasan, pengamatan dan penelitian bahan dan keterangan lingkup penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan daerah;
- c. memproses pemeriksaan kewajiban perpajakan daerah;
- d. memproses pemeriksaan kewajiban retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
- e. menyusun bahan koordinasi penyidikan dengan aparat penegak hukum;
- f. memproses penyidikan tindak pidana perpajakan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

15. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

- a. melakukan pencatatan dan akses data penerimaan PAD dalam program sistem aplikasi keuangan;

- b. melakukan rekonsiliasi penerimaan PAD;
 - c. menyusun rancangan program sistem aplikasi administrasi pajak daerah;
 - d. melakukan pengendalian operasional program sistem aplikasi administrasi pajak daerah;
 - e. menyusun data realisasi pajak dan retribusi daerah untuk perhitungan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - f. menyusun laporan penerimaan PAD;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.
16. Kelompok jabatan fungsional tertentu
- Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

